

	<p>ATRIUM: JURNAL ARSITEKTUR ISSN: 2442-7756 E-ISSN: 2684-6918 atrium.ukdw.ac.id</p>
---	---

**Penataan Kampung Kota Melalui Pendekatan Partisipatif di Bantaran Sungai Code, Yogyakarta
 Studi Kasus: Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta**

| Diterima pada 27-01-2022 | Disetujui pada 29-03-2022 | Tersedia online 20-08-2022 |
 | DOI <https://doi.org/10.21460/atrium.v8i2.165> |

Febriatmo Teguh Prakoso¹, Paulus Bawole²

1, 2. Magister Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 – 25, Yogyakarta
 Email: febriatmoteguh@gmail.com

Abstrak

Permukiman di bantaran sungai Code, Kelurahan Suratmajan mengalami berbagai permasalahan mulai dari kepadatan penduduk yang tinggi, bangunan yang tidak teratur, persoalan drainase permukiman, dan potensi bencana lainnya. Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan pendekatan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan program penataan permukiman melalui partisipasi masyarakat di bantaran sungai Code, Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta. Konsep penataan permukiman, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan digunakan sebagai pisau analisis dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PLPBK melalui pendekatan partisipatif tidak hanya menghasilkan perubahan infrastruktur tetapi berdampak pula pada perubahan pola pikir dan perilaku. Dampak penataan permukiman ini mengarah pada aspek sosial lingkungan, dan ekonomi. Pada pelaksanaan program, unsur-unsur partisipasi terpenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam program tersebut ialah partisipasi otentik dengan tingkatan *supporting in dependent community interest*.

Kata kunci: penataan kampung kota, partisipasi masyarakat, bantaran sungai, Yogyakarta.

Abstract

Title: Urban Kampung Re-Arrangement in Code Riverbank Yogyakarta through Participatory Approach; Case Study: Kampung of Gemblakan Bawah, Suryatmajan Sub-district, Yogyakarta City

Sub-district Suryatmajan is one of the slum areas in Yogyakarta. The settlements along the Code riverbanks, Suratmajan Sub-district have various problems such as high population density, irregular buildings setting, environment drainage/sewerage, being prone to fire, flood, cold lava overflow from Merapi Volcano, and other disasters. The Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBK) program, continued with the Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) program, as attempts to overcome these problems with participatory approach. This study aims to explain the implementation of the settlement re-arrangement program through community participation along the Code Riverbank, Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan Sub-district, Danurejan District, Yogyakarta. The concepts of settlement re-arrangement, sustainable development, and community participation are the analytical tools for achieving the research objectives. This research is a qualitative descriptive study with primary data from interviews, observations, and documentation, supported by some secondary data. The results of the PLPBK program, followed by the Kotaku program through a participatory approach, can be seen in infrastructure changes and changes in mindset and behavior. The impact of this settlement re-arrangement related to socio-cultural, environmental, and economic aspects. In the implementation of the program, the elements of participation are fulfilled. The form of community participation in the program is authentic participation with a level of support for independent community interests. Furthermore, the concept of

communication that is carried out in stages through the role of leaders and the community participation in submitting opinions can be seen as the participatory approach of this program.

Keywords: *urban kampung re-arrangement, community participation, riverbanks, Yogyakarta.*

Pendahuluan

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia. Demi mewujudkan kebutuhan ini, manusia akan berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk menginvasi tempat-tempat sisa yang tak berpenghuni seperti pinggiran sungai di Kampung Gemblakan Bawah ini. Dari tahun ke tahun penghuni bantaran sungai ini semakin bertambah, invasi semakin meluas sehingga permasalahan akan perumahan semakin serius ditambah dengan ancaman bencana alam.

Pertumbuhan permukiman di sepanjang tepi sungai ini sudah berjalan sejak sebelum Indonesia merdeka dan pada waktu itu tidak ada kontrol dari pemerintah daerah untuk mengamankan tepi sungai sebagai kawasan hijau atau biasa dikenal dengan *green belt*. Dari ketiga sungai tersebut, Sungai Code merupakan sungai yang hulunya berada pada puncak Gunung Merapi yang ada di sebelah utara. Dengan demikian bahaya banjir dan tanah longsor sering terjadi pada aliran Sungai Code terutama pada saat musim hujan yang mengalirkan lahar dingin dari puncak Gunung Merapi.

Banjir yang seringkali menyapu bantaran Code bila musim hujan, terkadang disertai banjir lahar dingin dari Gunung Merapi membuat wilayah ini tidak aman. Sementara itu kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir membuat kerugian yang tidak

sedikit. Walaupun demikian masyarakat masih bersikeras untuk tetap tinggal di bantaran Sungai Code. Keadaan ini membuat area tepi sungai menjadi kumuh dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim. Limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai. Demikian juga dengan sampah padat yang diproduksi masyarakat setempat.

Kondisi ini dirasakan masyarakat di kawasan kumuh Kampung Gemblakan Bawah, Kota Yogyakarta. Sebagian besar wilayah tersebut terletak di bantaran sungai Code yang masuk dalam kategori rentan banjir menurut pembagian kelas tingkat kerentanan banjir (Nurhadi et al., 2016: 75-86). Permasalahan kumuh di Suryatmajan meliputi kepadatan bangunan yang cukup tinggi, bangunan yang tidak teratur, tidak tersedianya drainase di permukiman, saluran air limbah tercampur dengan saluran air hujan, air minum tidak layak konsumsi, serta kurangnya proteksi kebakaran. Selain banjir bencana gempa bumi, kebakaran, bahkan bencana sosial pun merupakan ancaman yang besar bagi kelompok rentan ini. Bila bencana ini terjadi kelompok masyarakat ini akan mengalami kesulitan yang hebat, karena mereka tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana alam maupun bukan bencana alam yang kemungkinannya bisa terjadi.

Kampung Gemblakan Bawah ini pernah diterjang banjir lahar dingin pada tahun 2010 (Kompas, 2010) serta banjir pada tahun 2015. Sebagian rumah warga yang berada di sepanjang

bantaran sungai mengalami kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit. Pada tahun 2014, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Mataram, Kelurahan Suryatmajan melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Melalui program ini, RW 07, 08, dan 09 Kampung Gemblakan dibantu dalam mengatasi berbagai permasalahan permukiman yang ada di wilayahnya.

Penataan lingkungan permukiman yang dimaksud adalah penataan permukiman yang prosesnya melibatkan masyarakat secara partisipatif terutama dalam menggali permasalahan dan potensi wilayah untuk pengembangan wilayah permukimannya. Menurut Abdulsyani (1994) terdapat 4 fungsi dari struktur sosial yaitu mempertahankan pola, integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi. Struktur sosial yang ada memberikan semacam arahan bagi pelaksanaan program, membuat masyarakat menjadi terkoordinir dalam program, memobilisasi masyarakat dalam penentuan dan pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan dalam program, serta hubungan yang didasarkan pada struktur sosial mampu menjadi sarana masyarakat dalam menyesuaikan terhadap apa yang akan terjadi ke depan pada lingkungannya. Menurut Indriati (2017: 30-37) diketahui bahwa sumber daya dan aturan sosial yang berada dalam struktur sosial dapat menjadi pendorong atau penghalang dalam melakukan tindakan.

Dalam praktiknya, program PLPBK tidak mudah dilaksanakan. Hal ini sangat membutuhkan kekuatan sosial

termasuk struktur sosial dalam masyarakat yang sangat mendukung proses perancangan yang bersifat partisipatif. Peran partisipasi seseorang atau kelompok masyarakat dalam pembangunan dapat terbagi menjadi empat kategori, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam melaksanakan partisipasi pembangunan, ada 5 tingkatan partisipasi di dalam masyarakat menurut Wilcox (Ariesta PP & Wijaya, 2014: 382-391) yaitu memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan memberikan dukungan.

Struktur sosial yang berkembang di masyarakat memiliki fungsi untuk mempertahankan pola, sebagai fungsi integrasi, sebagai fungsi pencapaian tujuan dan fungsi adaptasi (Abdulsyani, 1994). Pengelola komunitas yang mulai dibentuk pada tahun 2017 ini berperan sebagai motor dalam terwujudnya 0% kumuh di Kampung Gemblakan Bawah. Program PLPBK sudah dilaksanakan di Kelurahan Suryatmajan dilanjutkan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mempunyai target untuk 100% akses pada air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses terhadap sanitasi pada tahun 2019.

Dimulai dengan adanya kegiatan membersihkan sungai, kemudian mitigasi bencana sekaligus membuat suasana kampung menjadi semakin asri. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa. Berdasarkan data-data dan permasalahan yang ada, penelitian bertujuan untuk menjelaskan

pelaksanaan program penataan permukiman kumuh melalui partisipasi masyarakat di bantaran Sungai Code, Kampung Gemblakan Bawah Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan deskriptif yaitu mempunyai deskripsi bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang berupaya menjelaskan realita sosial yang menjadi obyek penelitian, yakni penataan permukiman di bantaran Sungai Code, Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta. Lokasi penelitian difokuskan pada lingkup kawasan RW 07 Kampung Gemblakan Bawah yang sering terdampak banjir maupun lahar dingin.

Peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai informan dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria yang ditentukan peneliti sebagai informan yaitu warga Kampung Gemblakan Bawah yang terlibat aktif dalam aksi program penataan permukiman. Selain warga, data-data penelitian juga didapat dari penyelenggara PLPBK.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara data sekunder dalam penelitian didapatkan dari studi

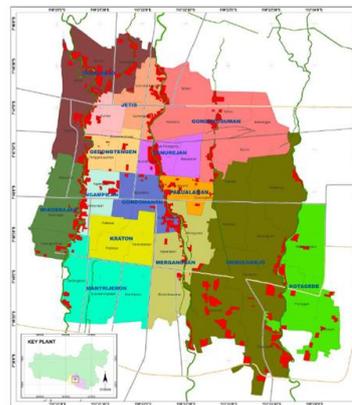
pustaka dan beberapa dokumen laporan pelaksanaan program yang sudah berjalan.

Validitas data diuji dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif menerapkan langkah-langkah Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penataan Permukiman

Kota Yogyakarta adalah ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini dilalui 3 sungai besar yaitu sungai Winongo, Code, dan Gajahwong (Gambar 1). Di sepanjang tepi ketiga sungai tersebut berkembang permukiman informal yang dikembangkan oleh masyarakat secara spontan.



Gambar 1. Kawasan permukiman kumuh yang berkembang di bantaran tiga sungai besar di Kota Yogyakarta.

Sumber: SK Walikota Yogyakarta No. 216, Tahun 2016

Kawasan bantaran Sungai Code, khususnya pada RW 07 Kampung Gemblakan Bawah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi

terlihat dari jarak antar rumah yang sesak dengan beberapa area umum di lingkungan sebagai tempat ekspansi kegiatan sehari-hari seperti mandi dan menjemur pakaian. Kampung ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan tidak ramah bagi siapa saja yang berkunjung ke Kampung Gemblakan Bawah. Hal yang menjadi catatan, bahwa wilayah tersebut rawan terhadap bencana alam, baik banjir maupun dampak lahar dingin dari erupsi Merapi (Gambar 2).



Gambar 2. RW 07 Kampung Gemblakan Bawah

Sumber:

<https://goo.gl/maps/Fgz6TNdUsiUiaZ298>, diakses dan diolah penulis 2019

Melihat dari potensi bencana alam yang mengancam dan citra lingkungan yang tidak ramah, pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya melalui program PLPBK mencoba menata kampung ini. Berdasarkan data kondisi lapangan, skenario penanganan daerah kumuh dan pengembangan kawasan di Kelurahan Suryatmajan mengarah pada penataan permukiman, infrastruktur, bantaran sungai dan mitigasi bencana (Gambar 3).



Gambar 3. Gang RW 07 Kampung Gemblakan Bawah

Sumber : Dokumentasi penulis, 2019

Pada tahun 2014 dimulailah penataan lingkungan dengan konsep yang diangkat adalah *Mundur, Munggah, Madhep Kali* (M3K) yang berarti memundurkan rumah untuk memberi sempadan sungai, naik, dan berorientasi atau menghadapkan rumah ke arah *kali* (sungai dalam bahasa Jawa). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ruang publik yang layak untuk aktivitas sehari-hari warga dan juga menumpuhkan kepedulian warga dalam merawat sungai. Ketika rumah menghadap ke sungai, kebersihan sungai akan menjadi wajah bagi rumah warga. Pada program M3K ini bangunan yang dekat dengan sungai dipotong 1,5 meter menjauh dari tepi sungai sesuai dengan sempadan sungai antara 3 sampai 5 meter dari tanggul. Keadaan ini juga bertujuan untuk mengamankan rumah tinggal dari terjangan banjir.

Upaya ini dilakukan, mengingat ruang publik merupakan bagian penting dari permukiman. Adanya ruang publik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mastutie et al., 2016). Pada kawasan padat penduduk, ruang publik yang terbuka merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, M3K diterapkan dalam penataan permukiman, salah satunya

untuk mengembalikan ruang bersama bagi interaksi dan aktivitas warga.

Di samping M3K, program PLPBK juga mengajak masyarakat berkontribusi dalam penataan permukiman. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya posko tanggap bencana oleh warga sendiri. Posko tersebut berisi alat-alat keselamatan, dan peta wilayah berisiko bencana, juga sudah adanya jalur evakuasi bila sewaktu-waktu diperlukan saat terjadi bencana.

Awalnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program PLPBK, namun dengan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah kota, kelurahan, hingga fasilitator dan masyarakat, maka program ini dapat berjalan dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Fasilitator sebagai orang yang memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat bekerja dengan baik. Masyarakat juga dapat menyampaikan kontribusi yang baik demi tercapainya program ini. Warga kampung Gemblakan Bawah bersama-sama berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan kampung. Desain penataan kampung, jalur evakuasi bencana, serta kegiatan kampung dirancang bersama-sama dengan warga secara partisipatif.

Melalui pengamatan di lapangan, diketahui bahwa telah terjadi perubahan. Sebuah wilayah yang sebelumnya kumuh dan termarjinalkan menjadi sebuah tempat yang tertata dengan mengedepankan nilai-nilai keselamatan, kenyamanan dan ikatan sosial yang baik. Hasil dari kolaborasi antara pemerintah, warga, dan fasilitator membuahkan hasil yang membanggakan bagi warga. Kehidupan yang semakin layak serta

wilayah dengan predikat ramah anak membuat kehidupan warga semakin bersemangat untuk selalu menjaga dan mengembangkan potensi yang sudah ada (Gambar 4, 5 dan 6).



Gambar 4. Talud penahan banjir
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019



Gambar 5. Posko bencana dan penunjuk arah jalur evakuasi
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019



Gambar 6. Pengadaan hidran kering
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019

Melalui peningkatan pengetahuan, pembenahan lingkungan yang baik, serta pengelolaan terhadap mitigasi

bencana membuat kampung ini menjadi lebih kuat terhadap bencana, baik bencana banjir maupun bencana non banjir. Kampung Gemblakan Bawah, khususnya RW 07, merupakan wilayah permukiman padat yang berpotensi dengan banjir dan kebakaran. Dengan potensi bencana tersebut, kapasitas masyarakat terus berkembang, terlebih dengan adanya bantuan melalui program PLPBK. Peninggian talud, konsep M3K, dan pengadaan hidran kering, merupakan cara yang digunakan untuk menekan risiko kebencanaan. Pelatihan-pelatihan serta kegiatan sosial merupakan kapasitas utama yang dimiliki wilayah ini.

Dalam penataan permukiman, diterapkan konsep *sustainable development*, yakni pembangunan yang mengkompromikan generasi yang akan datang. Parameter *urban sustainable settlement* ini meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Latif, 2020). Pada aspek lingkungan, penataan permukiman menitikberatkan pada bagaimana cara untuk mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan padat penduduk, infrastruktur permukiman, dan penanggulangan bencana. Penanganan wilayah kumuh yang dilakukan ialah pembuatan jalan beton, perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan drainase (BKM-Mataram, 2020).

Pada aspek sosial, penataan permukiman mengarah pada perubahan sosial terkait dengan pendidikan. Dengan tersedianya ruang publik, masyarakat dapat berinteraksi dan memanfaatkannya untuk tempat berkumpul serta kegiatan rutin seperti bermain dan belajar bersama bagi anak, pengajian, maupun kegiatan rutin masyarakat lainnya.

Dengan penataan permukiman M3K, warga yang memiliki usaha warung atau menghasilkan produk industri lokal kacang bawang sepanjang bantaran sungai mengalami dampak positif. Masyarakat lebih nyaman dan percaya untuk membeli produk tersebut. Dengan kondisi seperti ini maka diharapkan akan ada peningkatan secara ekonomi, dengan demikian parameter pada aspek ekonomi dapat tercapai.

Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman

Penataan permukiman di Kampung Gemblakan Bawah menerapkan pendekatan partisipatif. Partisipasi dan kontribusi masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat adalah ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat, dalam hal ini warga Kampung Gemblakan Bawah dalam pembangunan untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dilaksanakan di wilayah mereka serta secara mandiri melestarikan serta mengembangkan hasil proyek tersebut.

Nabila & Yuniningsih (2016: 1-20), terdapat 3 unsur dalam partisipasi masyarakat, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk berperan mandiri dalam program, masyarakat menjalankan program untuk mencapai tujuan bersama, serta pelaksanaan program melalui manajemen yang sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berkaitan dengan hal itu, penataan permukiman memenuhi unsur partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga Gemblakan Bawah adalah partisipasi otentik. Partisipasi otentik ini berupa kontribusi masyarakat dalam penataan permukiman. Warga memberikan kontribusi waktu, tenaga, dan gagasan

terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu warga ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui rembug warga, musyawarah, dan pertemuan-pertemuan untuk membahas mengenai aksi program. Partisipasi otentik dari warga ini berimbang pada penerimaan manfaat yang merata pada program.

Berdasarkan tingkat partisipasinya, dalam program PLPBK ini, partisipasi warga berada pada tingkatan *supporting in dependent community interests*. Hal ini merupakan tingkatan tertinggi dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkatan tersebut masyarakat diberi kekuasaan untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Hal ini ditunjukkan dengan prakarsa warga untuk mendirikan posko bencana di wilayahnya. Tingkat partisipasi ini telah melalui tahapan tingkat *information, consultation, deciding together, dan acting together* (Ariesta PP & Wijaya, 2014). Masyarakat berpartisipasi bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Proses pendekatan partisipatif dalam penataan permukiman tidak dengan mudah sampai pada tahap tersebut. Mengubah pola pikir warga bantaran Sungai Code yang sudah bertahun-tahun tinggal dalam kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang awal dan utama dalam program ini. Pendekatan partisipatif memerlukan waktu untuk sampai pada aksi skenario penanganan masalah yang telah direncanakan.

Pada praktiknya, konsep aliran komunikasi bertahap ganda (*two step flow communication*) menjadi model yang relevan diterapkan dalam proses pertemuan dan diskusi, terutama pada proses awal pendekatan partisipatif.

Pada model ini, pesan dan informasi mengalir dua tahap, melalui pemuka pendapat (*opinion leader*), selanjutnya ke partisipan komunikasi yang dituju, yaitu seluruh warga. Pemuka pendapat yang dimaksud ialah orang-orang yang dapat memengaruhi pendapat, sikap, keyakinan, hingga perilaku kelompok masyarakat tertentu (Jaya & Silviani, 2020: 6-16).

Pemuka pendapat merupakan aktor komunikasi yang berperan besar dalam divisi inovasi produk, teknologi, maupun dalam program pemerintah (Sidabutar, 2020). Ketua RW 07 di Kampung Gemblakan menjadi pemuka pendapat aktif yang memiliki posisi strategis di masyarakat. Pemuka pendapat ini memahami kondisi masyarakat dan memiliki penguasaan informasi yang baik mengenai situasi kampung Gemblakan. Dalam forum-forum pertemuan dengan warga, pemuka pendapat tersebut yang membuka diskusi dan secara informal menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Setelah pelaksanaan program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas, program penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta dilanjutkan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menargetkan setiap wilayah di Indonesia harus 100% mendapatkan akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% mempunyai akses terhadap sanitasi. Program Kotaku yang diimplementasikan pada setiap kelurahan di wilayah kota mewajibkan BKM untuk membuat Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang mengevaluasi perkembangan pembangunan di wilayah kelurahan setiap tahun.

Perkembangan pembangunan tersebut dilakukan baik dengan dana dari pemerintah daerah, swasta (CSR), maupun dana swadaya dari masyarakat sendiri.

Program Kotaku memberikan pendanaan pada wilayah kelurahan dengan skala lingkungan dan skala kawasan. Pada skala kawasan, pembangunan dilakukan lintas wilayah kelurahan maupun kecamatan dengan tema pembangunan yang sama untuk mengurangi kekumuhan. Sedangkan skala lingkungan pembangunan yang ditangani berada dalam satu wilayah kelurahan saja. Sedangkan dana yang diturunkan untuk program Kotaku cukup bervariasi kurang lebih antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00. Kekuatan

program Kotaku adalah berusaha melakukan pendanaan kolaborasi baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta maupun dari swadaya masyarakat. Oleh sebab itu untuk implementasi program Kotaku seringkali dana yang dikeluarkan lebih dari dana yang dihibahkan pada satu wilayah kelurahan.

Pada tahun 2017, program Kotaku skala lingkungan di wilayah Kelurahan Suryatmajan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan dana kolaborasi sebesar Rp347.475.000,00 dengan rincian Bantuan Dana Investasi (BDI) dari program Kotaku sebesar Rp345.000.000,00 dan Swadaya masyarakat sebesar Rp2.475.000,00 (lihat Tabel 1).

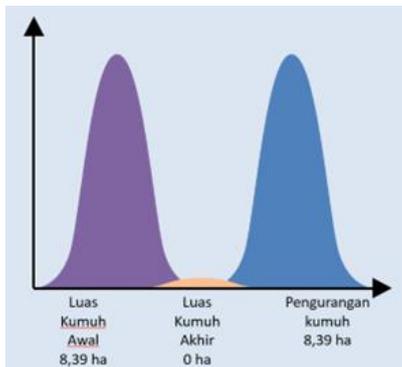
Tabel 1. Data kegiatan infrastruktur skala lingkungan tahun 2017

Lokasi		Detail Komponen		Volume	Satuan	Biaya		
		Kode	Jenis			BDI	Swadaya	Jumlah
RT004-RW002	Gumreget 6	L-021	Drainase lingkungan	179.00	meter	60.925.000	-	60.925.000
RT006-RW002	Gumreget 6	L-021	Drainase lingkungan	43.00	meter	14.635.000	-	14.635.000
RT006-RW002	Gumreget 6	L-055	Septictank komunal	1.00	unit	17.244.000	-	17.244.000
RT004-RW002	Gumreget 6	L-017	Jalan paving block	179.00	meter	51.762.000	1.225.000	52.987.000
RT006-RW002	Gumreget 6	L-017	Jalan paving block	43.00	unit	12.434.000	-	12.434.000
RT005-RW002	Gumreget 7	L-021	Drainase lingkungan	113.00	meter	37.300.000	-	37.300.000
RT005-RW002	Gumreget 7	L-017	Jalan paving block	82.00	meter	28.332.000	550.000	28.882.000
RT005-RW002	Gumreget 7	L-025	Pedestrian	41.00	meter	17.368.000	-	17.368.000
RT001-RW002	Gumreget 7	L-032	Saluran tertutup	44	meter	20.052.000	-	20.052.000
RT001-RW002	Gumreget 8	L-025	Pedestrian	33.5	meter	14.103.000	-	14.103.000
RT001-RW002	Gumreget 8	L-022	Jalan paving block (min. lebar perkerasan 1.5 m)	188.5	meter	48.663.000	700.000	49.363.000
RT001-RW002	Gumreget 8	L-082	Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) seperti prasarana olah raga,	64	m ²	22.182.000	-	22.182.000

			sarana bermain, dll.					
						345.000.000	2.475.000	347.475.000

Sumber: Program Kotaku Yogyakarta (Paparan profil kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta), 2019

Pelaksanaan program Kotaku skala lingkungan dilakukan untuk membangun jaringan drainase lingkungan, *septic tank* komunal, pedestrian, saluran tertutup, ruang terbuka hijau, dll (Kotaku-Yogyakarta, 2019). Proses pelaksanaan pembangunan skala lingkungan di wilayah Kelurahan Suryatmajan dilakukan untuk mengurangi prosentase kumuh di wilayah kelurahan. Berdasarkan data hasil survey tim fasilitator yang mendampingi program Kotaku di wilayah Kelurahan Suryatmajan, penanganan kawasan kumuh di wilayah ini mencapai luasan 8,39 Ha. Dengan kata lain, secara skor kekumuhan yang ditetapkan oleh program Kotaku, wilayah kumuh pada Kelurahan Suryatmajan menjadi 0 Ha. (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Grafik capaian pengurangan kawasan kumuh di Kelurahan Suryatmajan
 Sumber: Program Kotaku Yogyakarta: paparan profil kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, 2019

Pelaksanaan program Kotaku di wilayah ini dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk oleh Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) di wilayah Kelurahan Suryatmajan. Proses pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya pihak BKM dan KSM didampinbgi oleh tim fasilitator yang dibentuk oleh pihak pemerintah daerah. Salah satu proses pembangunan program Kotaku untuk membangun *septic tank* komunal menyerap dana sebesar Rp7.527.000,00 dengan rincian dana BDI sebesar Rp7.244.000,00 dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp283.000,00. Proses pembangunan *septic tank* komunal dapat dilihat pada serial foto pelaksanaan pembangunan di bawah ini (lihat Gambar 8).



Gambar 8. Kegiatan pembangunan *septic tank* komunal di wilayah Kelurahan Suryatmajan

Sumber: Program Kotaku Yogyakarta: Profil Kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, 2019.

Meskipun secara skor wilayah banyak spot-spot wilayah yang terlihat Kelurahan Suryatmajan sudah kumuh (lihat Tabel 2). dinyatakan 0 ha, secara realistis masih

Tabel 2. Data kegiatan infrastruktur skala lingkungan tahun 2017

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PERSEN (%)	NILAI
1. Kondisi bangunan gedung	a. Ketidakteraturan bangunan	136	Unit	25.90%	1
	b. Kepadatan bangunan	1.15	Ha	26.61%	1
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	12	Unit	2.29%	0
Rata-rata kondisi bangunan gedung				17.50%	
2. Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	0	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	10	Meter	1.42%	0
Rata-rata kondisi jalan lingkungan				0.00%	
3. Kondisi penyediaan air minum	a. Ketersediaan akses aman air minum	368	KK	53.08%	3
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	19	KK	2.80%	0
Rata-rata kondisi penyediaan air minum				26.54%	
4. Kondisi Drainase	a. Ketidakmampuan pengaliran limpasan air	0	Ha	0.00%	
	b. Ketidaktersediaan drainase	455	Meter	12.82%	0
	c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota	0	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya drainase	185	Meter	5.21%	0
	e. Kualitas konstruksi drainase	45	Meter	1.27%	0
Rata-rata kondisi drainase lingkungan				0.00%	
5. Kondisi pengelolaan air	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	89.11	KK	12.84%	0
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan	182.94	KK	26.36%	1
Rata-rata kondisi penyediaan air limbah				13.18%	
6. Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan	231	KK	33.29%	1
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	134	KK	19.31%	0
	c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	262	KK	37.75%	1
Rata-rata kondisi pengelolaan persampahan				23.68%	
7. Kondisi proteksi kebakaran	a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	150	Unit	28.57%	1
	b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	282	Unit	53.71%	3
Rata-rata kondisi pengelolaan persampahan				41.14%	
Total Nilai					12
Tingkat kekumuhan					Tidak Kumuh
Rata-rata kekumuhan sektoral					17.43%

Sumber : Program Kotaku Yogyakarta: Profil Kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, 2019

Dengan demikian pembangunan di wilayah Suryatmajan masih terus dilakukan. Pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Suryatmajan mendapatkan dana pembangun dari Musrenbang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana swadaya dari masyarakat. Pihak BKM didampingi fasilitator, setiap tahun

melakukan *review* RPLP untuk memonitor perkembangan pembangunan di wilayah Kelurahan Suryatmajan.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka dilakukan penataan

kembali data dan indikator yang akan digunakan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi. Perubahan signifikan yang akan dilakukan adalah dengan mengubah pendekatan indikator dari yang sebelumnya berbasis keluaran/*output*, menjadi berbasis hasil/*outcome* (BKM-Mataram, 2020).

Keadaan ini disesuaikan dengan konsep SDGs 2030 yang juga menjadi tujuan pemerintah Indonesia, yaitu:

- Pembangunan yang berusaha menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- Pembangunan yang difokuskan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
- Pembangunan yang diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola, yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya; Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Indonesia ini diwujudkan dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs (17 tujuan). Penanganan kumuh yang berorientasi SDGs, dapat dilihat pada:

- Tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak).
- Tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan).
- Tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
- Tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim).

- Tujuan ke-14 (ekosistem lautan) dan tujuan ke-15 (ekosistem daratan).

Data *review* RPLP terakhir yang dilakukan oleh BKM dan fasilitator dibuat tahun 2020. Berdasarkan skor hasil *review* Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Tahun 2020, kawasan Gemblakan Bawah di Kelurahan Sorosutan sudah tidak kumuh lagi. Walaupun demikian, masih terdapat kumuh sektoral yang terdeteksi dengan prosentase sebesar 17,43%. Dengan demikian proses pembangunan di wilayah Kelurahan Suryatmajan harus terus dilakukan dengan berpegang pada hasil *review* RPLP yang dilaksanakan setiap tahun oleh BKM Mataram, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta.

Pada *review* RPLP tahun 2020 Tim Inti Perencanaan Partisipatif BKM Mataram merencanakan dua program pembangunan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Kedua program tersebut masing-masing adalah pengembangan kawasan bantaran sungai dan kawasan kampung sayur. Untuk pengembangan kawasan bantaran sungai, program yang harus direncanakan adalah (Gambar 9):

- Penataan bantaran sungai harus dilakukan dengan tetap melaksanakan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali).
- Membuka akses kawasan bantaran dengan akses kota, sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan aktivitas keseharian dan perekonomiannya.
- Memanfaatkan sungai sebagai penunjang perekonomian dengan budidaya air tawar dengan karamba.



Gambar 9. Kawasan bantaran Sungai Code yang perlu dijaga kelestariannya dengan program M3K

Sumber: Review RPLP tahun 2020 (BKM-Mataram, 2020)

Untuk pengembangan kampung sayur beberapa program yang sudah dilaksanakan dan diinisiasi oleh kelompok masyarakat harus tetap direncanakan adalah (Gambar 10):

- Pengembangan kampung sayur yang sudah diinisiasi di Kampung Gemblakan Bawah harus tetap dilestarikan dan terus mengembangkan akses pemasaran produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu pendampingan masyarakat terkait pemasaran.
- Karakter wilayah yang padat permukiman dengan ruang terbuka yang minim, mau tidak mau harus memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam tanaman sayur sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.



Gambar 10. Kawasan kampung sayur yang dikunjungi Wakil Walikota Yogyakarta.

Sumber: Review RPLP tahun 2020

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Program PLPBK yang dilanjutkan dengan program Kotaku di bantaran Sungai Code, Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta berdampak luas pada pembangunan wilayah dan masyarakatnya. Melalui pendekatan partisipatif, program-program ini menghasilkan perubahan fisik fasilitas infrastruktur yang kemudian berimbas pada perubahan pada aspek sosial-budaya, lingkungan, dan perekonomian masyarakatnya. Program ini melingkupi penataan pemukiman, infrastruktur, penanganan permasalahan bantaran sungai, dan mitigasi bencana. Pendekatan partisipatif sangat tepat dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang berkembang di tengah kota. Pada pelaksanaan kedua program tersebut, semua unsur partisipasi dapat terpenuhi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam program tersebut ialah partisipasi otentik dengan tingkatan *supporting independent community interest*. Masyarakat secara mandiri mengambil keputusan untuk membangun wilayahnya, terutama pada aksi mitigasi bencana dengan pendirian posko bencana. Selanjutnya, konsep aliran komunikasi bertahap ganda (*two step flow communication*) melalui peran pemuka pendapat tampak dalam pendekatan partisipatif ini. *Opinion leader* ini menjadi kunci dalam penyebaran informasi dan membangun keyakinan masyarakat.

Saran/Rekomendasi

Penelitian ini membahas mengenai penataan permukiman dan pendekatan partisipatif di dalamnya, tetapi belum

menjelaskan mengenai keberlanjutan program, khususnya tentang kemandirian masyarakat pasca program berjalan. Harapan dari program dengan pendekatan partisipatif ini adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merawat serta mengembangkan hasil penataan permukiman tersebut. Aspek ini dapat dibahas oleh peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi: skematika, teori, dan terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ariesta PP, E., & Wijaya, H. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daur ulang sampah di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 3(3), 382-391. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/5612>
- BKM-Mataram. (2020). *Review RPLP 2020 Keluarahan Suryatmajan*. Yogyakarta: Unpublished Document.
- Indriati, I. (2017). Formasi spasial permukiman kumuh kota (studi kasus: perubahan pola ruang bermukim pada lahan di Jalan Sersan Sani Palembang. *Jurnal Arsitektur Arsir*, 1(1), 30-37. DOI: <https://doi.org/10.32502/arsir.v1i1.855>
- Jaya, A., & Silviani, I. (2020). Peran komunikasi opinion leader dalam meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah di Sumatera Utara. *Message: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 6-16. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/messageilmukomunikasi/article/view/677/593>
- Kompas. (2010, November 7). Banjir lahar dingin di Code. *Kompas.com*. <https://amp.kompas.com/bola/read/2010/11/07/02564041/banjir-lahar-dingin-di-code?amp=1&page=1>
- Kotaku-Yogyakarta. (2019). *Paparan profil kawasan permukiman Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Unpublished Report.
- Latif, M. (2020). *Penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi dengan konsep urban sustainable settlement* (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Tidak dipublikasikan).
- Mastutie, F., Supardjo, S., & Prijadi, R. (2016). Model ruang publik pada permukiman padat kota di kawasan. *Temu Ilmiah IPLBI 2016*, Malang: 26-28 Oktober 2016. Hal. 065-072.
- Nabila, A., & Yuniningsih, T. (2016). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kadri Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12543>
- Nurhadi, Sumunar, D.R.S., & Khotimah, N. (2016). Analisis kerentanan banjir dan penanggulangan bencana. *Jurnal Penelitian Saintek*, 21(2), 75-86. <https://journal.uny.ac.id/index.php/saintek/article/download/10553/pdf>
- Sidabutar, W. (2020). *Analisis jaringan komunikasi pada efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai*

alat/metode kontrasepsi di Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Gaharu Kota Medan. (Tesis S2, Universitas Sumatera Utara, 2020. Tidak dipublikasikan).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.